



# KEPENTINGAN NASIONAL RRC DI HONGKONG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi  
Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Sastra

oleh :

**RATNA WIDIASTUTI**

NIM 93112003

Jurusan Sastra Asia Timur

Program Studi Cina

FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA

1997

Skripsi ini telah diujikan pada hari Kamis 21 Agustus 1997

PANITIA UJIAN

Ketua



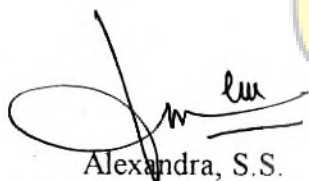
Drs. Ismail Marahimin

Pembimbing



Priyanto Wibowo, S.S.

Panitera



Alexandra, S.S.

Pembaca



DR. A. Dahana

Disahkan pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_.

Oleh:

Ketua Jurusan Sastra Cina



Dra. Inny C. Haryono, M.A.

Dekan



FAKULTAS SASTRA Drs. Ismail Marahimin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Sastra Program Strata satu (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Universitas Darma Persada.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. W.D. Sukisman, selaku Rektor Universitas Darma Persada.
2. Bapak Drs. Ismail Marahimin, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
3. Ibu Dra. Inny C. Haryono, M.A., selaku Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Cina Universitas Darma Persada.
4. Bapak Priyanto Wibowo, S.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membantu memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
5. Bapak DR. A. Dahana, selaku Pembaca skripsi penulis.
6. Ibu Alexandra, S.S., selaku Panitera dalam sidang skripsi penulis.
7. Bapak Hin Goan Gunawan, S.S. dan Bapak Drs. Sidharta, selaku Dosen yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.

8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Darma Persada.
  9. Para staf pegawai sekretariat sastra yang membantu penulis dalam proses perkuliahan.
  10. Orangtua penulis, yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi.
  11. Kakak-kakak, Adik, dan Saudara penulis, Mas Bobby, Mbak Kiki, Mbak Ati, Tommy, Mbak Darmi yang benar-benar banyak membantu proses penulisan skripsi penulis.
  12. Keluarga Mr. Lay dan Mr. Lee di Hongkong yang telah banyak memberikan sumber-sumber informasi dan bahan-bahan skripsi bagi penulis.
  13. Sahabat baik penulis di SD, SMP, SMA Tarakanita, khususnya Ria dan Eli yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
  14. Rekan-rekan angkatan 1993, Sastra Cina S1, Arda, Budi, Dela, Erwin, Fenny, Jerry, Jonly, Lei, Lianti, Libby, Rianna, Sonny, Yiyang, Ardi, Iis yang selalu membantu dan mendukung penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi.
- Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan almamater Universitas Darma Persada.

Jakarta, November 1997

Penulis

Ratna Widiastuti

# DAFTAR ISI

## Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Pokok Permasalahan .....	3
I.3. Tujuan Penulisan .....	4
I.4. Kerangka Teori .....	4
I.5. Perumusan Hipotesis .....	7
I.6. Metode Penulisan .....	8
I.7. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : LATAR BELAKANG STATUS HONGKONG .....	12
II.1. Sejarah Kolonialisme Inggris di Hongkong .....	17
II.2. Usaha Cina mengambil alih Hongkong dari tangan Inggris.....	21
BAB III : KEPENTINGAN NASIONAL RRC DI HONGKONG .....	31
III.1. Kepentingan Politik RRC di Hongkong .....	31
III.2. Kepentingan Ekonomi RRC di Hongkong .....	41
BAB IV : PELAKSANAAN KEPENTINGAN NASIONAL RRC DI HONGKONG .....	58
IV.1. Pelaksanaan di Bidang Politik .....	60
IV.2. Pelaksanaan di Bidang Ekonomi .....	63
IV.3. Pelaksanaan di Bidang Militer .....	66
BAB V : KESIMPULAN .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Hongkong merupakan wilayah koloni Inggris yang terletak di pantai sebelah tenggara Cina, sekitar 145 km dari Kanton, ibukota propinsi Guangdong. Teritorial Hongkong terdiri dari pulau Hongkong seluas 78 km<sup>2</sup>, Semenanjung Kowloon seluas 13 km<sup>2</sup>, Wilayah Baru / *New Territories* seluas 975 km<sup>2</sup>, serta berbagai pulau sekitarnya, dari Semenanjung Kowloon sampai perbatasan Cina, yang luas keseluruhannya 1.066 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Berdasarkan Perjanjian Nanjing tanggal 29 Agustus 1842, Inggris memperoleh pulau Hongkong dan berdasarkan Perjanjian Beijing I tanggal 24 Oktober 1860, Inggris memperoleh Kowloon. Pada tahun 1898 yaitu sesuai dengan Perjanjian Beijing II, *New Territories* yang semula merupakan propinsi Guangdong, disewakan kepada Inggris selama 99 tahun mulai tanggal 9 Juni 1898.

Sejak awal tahun 1950-an, atau sejak PKC berhasil merebut kekuasaan di daratan Cina, negara itu telah menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Kekaisaran Qing pada tahun 1842 atas Hongkong, tahun 1860 atas Kowloon dan tahun 1898 atas New Territory, adalah tidak seimbang karena penandatanganan terjadi di bawah tekanan dan paksaan Inggris.<sup>2</sup>

Usaha pemerintah Beijing menguasai kembali Hongkong sebenarnya sudah sejak awal tahun 1950-an juga, tetapi menghadapi kendala. Pada tanggal 8 Maret 1972, Cina

<sup>1</sup> Anonim, *Negara dan Bangsa 3*, Grolier Internasional, Jakarta, 1989, h. 45.

<sup>2</sup> Ilham Gunawan, *Kamus Politik Internasional*, CV. Restu Agung, Jakarta, 1983, h. 62-63.

melaporkan kepada Komite Khusus PBB dalam Dekolonisasi tentang “penyelesaian masalah Hongkong dan Makao yang merupakan hak kuasa Cina.” Tanggal 1 Januari 1980 diberlakukan perubahan konstitusi yang baru yang pertama dilakukan pemerintah RRC dalam usaha melaksanakan penyatuan kembali wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu Kongres Rakyat Nasional membentuk Komisi Pembaharuan Konstitusi yang berhasil membuat rancangan konstitusi yang diperbaharui. Salah satu pasal dalam rancangan konstitusi yang baru (pasal 31) khusus dibuat untuk pembentukan wilayah administrasi khusus.

Pasal ini terutama dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah masa depan Hongkong, Taiwan dan Makao, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Negara mengizinkan, jika perlu membentuk wilayah administrasi khusus, Undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah-daerah khusus itu akan ditentukan oleh hukum menurut kondisi spesifik”.

Berdasarkan pasal 31 ini secara terbuka pada bulan Juli 1982 Peng Zhen, Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional menyatakan bahwa pemerintah RRC akan mengambil alih kembali atas Hongkong, Taiwan dan Makao.

Perundingan tentang status Hongkong mulai dilakukan ketika PM Inggris Margareth Thatcher mengunjungi Beijing bulan September 1982. Thatcher mengadakan serangkaian pembicaraan dengan pemimpin Cina Deng Xiaoping mengenai status Hongkong.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Endi Rukmo, “Hongkong di bawah Kedaulatan Republik Rakyat Cina”, *Analisa*, tahun XIII, no. 12, Desember 1984, h. 941.

<sup>4</sup> *Antara*, 20 Desember 1984.

Setelah kunjungan PM Thatcher, dimulailah pembahasan RRC-Inggris mengenai masa depan Hongkong. Pembahasan yang lebih terperinci dan perundingan resmi yang pertama antara Cina dan Inggris dimulai pada pertengahan bulan Juli 1983.<sup>5</sup> Perundingan resmi ini berlangsung selama 22 babak yang berakhir awal bulan September 1984.

Setelah melalui perundingan yang cukup berat selama dua tahun atau lebih dari 20 babak, pada tanggal 26 September 1984, pemerintah Inggris dan pemerintah RRC berhasil menyusun sebuah Deklarasi Bersama tentang masa depan Hongkong. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing, PM Margaret Thacher dan PM Zhao Ziyang menandatangani. Pokok dari isi Deklarasi Bersama itu adalah tentang pengaturan Hongkong setelah RRC mengambil kembali kedaulatannya pada tanggal 1 Juli 1997.<sup>6</sup>

## **I.2. Pokok Permasalahan**

Berawal dari latar belakang bagaimana gencarnya usaha pemerintah Beijing untuk menguasai kembali Hongkong, sejak awal tahun 1950-an dan melalui berbagai macam perundingan sampai ditandatanganinya Deklarasi Bersama antara RRC dan Inggris tentang masa depan Hongkong pada tanggal 19 Desember 1984, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah, “Apa yang menjadi kepentingan RRC atas Hongkong?”

---

<sup>5</sup> *Pelita*, 21 Mei 1984.

<sup>6</sup> Endi Rukmo, *op.cit*, h. 938.



### **I.3. Tujuan Penulisan**

Setelah RRC diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, maka sebagaimana lazimnya suatu negara baru, perhatian dicurahkan terutama kepada keutuhan wilayah, konsolidasi kekuasaan, dan pencegahan terhadap bahaya luar negeri.

Dalam waktu dua tahun, pemerintahan RRC telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Cina; hanya Pulau Taiwan masih dikuasai oleh sisa-sisa Pemerintahan Nasionalis Cina, sedangkan Hongkong dan Makao masih tetap berstatus koloni, masing-masing dari Inggris dan Portugal.

Pada tahun 1978 dan 1979, RRC memasuki suatu periode sejarah yang baru. Periode ini ditandai dengan adanya tujuan-tujuan modernisasi yang cepat. Program-program yang disusun dimaksudkan untuk mengubah RRC menjadi suatu negara sosialis yang kuat dan modern pada akhir abad ke-20. Disebutkan juga bahwa terdapat tiga tujuan utama RRC pada dekade 80-an, yaitu modernisasi ekonomi, memberantas hegemoni, dan melakukan penyatuan kembali wilayah-wilayahnya yang jatuh ke tangan asing.

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, menjelaskan apa yang menjadi kepentingan RRC atas Hongkong hingga kepentingan ekonomi menjadi prioritas RRC dalam menangani masalah Hongkong dan pelaksanaannya.

### **I.4 Kerangka Teori**

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan, dibutuhkan teori-teori untuk membantu menganalisa permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan yang diajukan berkaitan dengan kepentingan nasional RRC di Hongkong, maka adalah

relevan jika permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori kepentingan nasional.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.<sup>7</sup>

Sedangkan Paul Seabury menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

Ide kepentingan nasional mengacu kepada sejumlah perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa ..... yang harus ditemukan sebagai dasar pelaksanaan hubungan luar negeri negara tersebut.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton unsur-unsur yang tercakup dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dilihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan nasional dengan politik luar negeri. Menurut Sumpena Prawirasaputra, politik luar negeri dapat diterangkan sebagai:<sup>10</sup>

Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi.

Sedangkan menurut T. B. Millar:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, CV. Abardin, Bandung, 1990, h. 114.

<sup>8</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisa*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, h. 135.

<sup>9</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Nasional*, CV. Abardin, Bandung, 1990, h. 7.

<sup>10</sup> Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, h.7.

<sup>11</sup> T. B. Millar, "On Writing About Foreign Policy," dalam James N. Rosenau (ed), *Internasional Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1969, h. 57.

Politik luar negeri sekiranya merupakan keseluruhan kebijaksanaan yang memberi akibat antara hubungan pemerintahan suatu bangsa dengan pemerintahan bangsa lainnya.

Politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh determinan-determinan lain.

Menurut William D. Coplin, determinan-determinan yang turut menentukan perumusan politik luar negeri adalah perilaku pembuat keputusan, politik domestik, faktor ekonomi dan militer, dan situasi internasional yang meliputi lokasi geografis, kekuatan militer dan ekonomi negara-negara tetangga, eksistensi pemerintah yang agresif maupun pasif, perjanjian-perjanjian persahabatan, dan adanya masalah yang dianggap sebagai masalah bersama.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dan politik luar negeri, maka suatu negara memerlukan seperangkat sarana untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah melalui perdagangan sebagai sarana politik luar negeri. Hal tersebut mempunyai tiga macam tujuan; yaitu (1) untuk memperoleh suatu tujuan politik luar negeri dengan memanfaatkan secara bijaksana faktor kebutuhan dan ketergantungan dan menawarkan bonus ekonomi atau mengancam dengan memberlakukan tekanan ekonomi; (2) untuk meningkatkan kesanggupan suatu negara tertentu atau menghambat suatu negara yang potensial mencapai kemampuan ekonominya; dan (3) untuk menciptakan 'satelit' ekonomi ( umpama pasaran dan sumber-sumber perbekalan yang terjamin ) atau dengan membantu mempertahankan suatu kepatuhan politis di negara-negara 'satelit' atau melalui 'lingkaran-

---

<sup>12</sup> William D. Coplin, *Introduction to International Politics*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc, 1980, h. 167-178.

lingkaran pengaruh' dengan menciptakan suatu keterkaitan yang bersifat ketergantungan ekonomi.<sup>13</sup>

Berdasarkan kenyataan bahwa Hongkong kembali ke dalam wilayah kedaulatan RRC dan keadaan yang ingin diciptakan oleh RRC di Hongkong pada tanggal 1 Juli 1997 maka relevan juga kalau dipakai konsep integrasi Karl W. Deutsch, yang mengartikan konsep integrasi dengan konsep *security-community* (komunitas keamanan), yaitu penciptaan "lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang cukup kuat dan cukup meluas sehingga bisa menjamin, untuk waktu yang lama, harapan di antara penduduknya akan adanya perubahan secara damai."<sup>14</sup>

Berkaitan dengan masalah ini rasanya logis juga apabila dicantumkan tentang masalah kedaulatan. Menurut Morgenthau, dalam istilah teoritis, kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi dari bangsa yang membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah tertentu dan, sebagai akibatnya, bebas dari kekuasaan bangsa lain apa pun dan persamaan hak dengan bangsa lainnya menurut hukum internasional.<sup>15</sup>

## I. 5. Perumusan Hipotesis

Penelitian ini hanya akan melihat Kepentingan Nasional RRC dari dua aspek saja yaitu aspek politik dan ekonomi.

<sup>13</sup> K.J. Holsti, *op.cit*, h. 324-326.

<sup>14</sup> Moh'tar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, h.163.

<sup>15</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antarbangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, h. 210.

### 1. Kepentingan politik

Berdasarkan kepentingan nasionalnya, maka kembalinya Hongkong diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan politik yang diinginkan. RRC ingin mengambil kembali kedaulatannya atas wilayah-wilayah yang hilang, dan juga memperbaiki citranya baik di dalam maupun di luar negeri.

### 2. Kepentingan Ekonomi

Juga berdasarkan kepentingan nasionalnya, Hongkong diharapkan dapat dimanfaatkan untuk maksud-maksud ekonomi melalui jalur perdagangan. RRC bermaksud menjadikan Hongkong sebagai pintu gerbang RRC dalam berhubungan dengan negara-negara Barat dalam perdagangan luar negeri, dan menjadikan Hongkong sebagai tulang punggung modernisasi ekonomi RRC.

## **I.6. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penggambaran atas suatu obyek atau kejadian yang akan diteliti secara sistematis, kemudian dengan data-data (primer dan sekunder) yang diterima akan dilakukan analisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data-data mengenai kepentingan nasional RRC terhadap Hongkong, penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersangkutan baik itu merupakan buku-buku, laporan-laporan, pengaturan atau keputusan pemerintah, karya ilmiah, tulisan-tulisan di surat kabar serta media cetak lainnya.

Sumber kepustakaan yang penulis gunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah tulisan-tulisan atau gagasan orang-orang yang hidup dan mengalami

peristiwa tersebut, baik berupa buku, artikel, berita dan sebagainya. Sumber sekunder adalah bahan-bahan tulisan yang mengupas peristiwa gerakan tersebut yang ditulis oleh sarjana-sarjana yang melakukan penelitian tentang Cina.

Perlu juga disebutkan bahwa nama-nama atau istilah dalam bahasa Cina ditulis berdasarkan ejaan *Pinyin*, yaitu ejaan yang telah diperbaharui dan yang digunakan secara resmi di Cina sejak tahun 1956. Namun demikian, nama-nama dan istilah-istilah yang terlanjur populer, tetapi sebenarnya bukan merupakan ejaan *Pinyin* tetap dipertahankan, misalnya Hongkong, Kowloon, Co hong, Tung Cheehwa dan seterusnya.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan tentang :

- I.1. Latar Belakang Masalah
- I.2. Pokok Permasalahan
- I.3. Tujuan Permasalahan
- I.4. Kerangka Teori
- I.5. Perumusan Hipotesis
- I.6. Metode Penulisan
- I.7. Sistematika Penulisan

## BAB II. LATAR BELAKANG STATUS HONGKONG

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum asal mula sejarah kolonialisme Inggris di Hongkong hingga usaha Cina untuk mengambil alih Hongkong dari tangan Inggris. Bab ini terbagi menjadi :

II.1. Sejarah kolonialisme Inggris di Hongkong.

II.2. Usaha Cina mengambil alih Hongkong dari tangan Inggris.

## BAB III. KEPENTINGAN NASIONAL RRC DI HONGKONG

Pada bab ini akan dibahas mengenai usaha-usaha politik dan ekonomi yang dilakukan oleh RRC dalam kaitannya dengan kepentingannya terhadap Hongkong. Bab ini terbagi menjadi :

III.1. Kepentingan Politik RRC di Hongkong.

III.2. Kepentingan ekonomi RRC di Hongkong.

## BAB IV. PELAKSANAAN KEPENTINGAN NASIONAL RRC DI HONGKONG.

Bab ini berisi penjelasan pelaksanaan usaha politik, ekonomi dan militer yang dilakukan RRC. Bab ini terbagi menjadi :

IV.1. Pelaksanaan di Bidang Politik

IV.2. Pelaksanaan di Bidang Ekonomi

IV.3. Pelaksanaan di Bidang Militer

## BAB V. KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan, dan merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dikemukakan.

